

**KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DALAM PROSES
AKSESI KE *ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-
OPERATION AND DEVELOPMENT* (OECD)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

NURUL MUSTOFA

07041382126194

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DALAM PROSES
AKSESI KE *ORGANISATION FOR ECONOMIC*
***CO-OPERATION AND DEVELOPMENT* (OECD)**

SKRIPSI

Disusun Oleh

Nurul Mustofa
07041382126194

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal, 02 Mei 2025

Pembimbing I

1. Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, M.M.
NIP. 196002091986031004

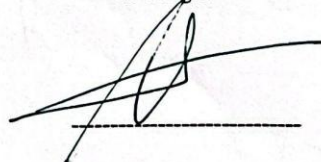
Tanda Tangan



Pembimbing II

2. Muh. Nizar Sohyb, S.IP., M.A.
NIP. 199301072023211022

Tanda Tangan



Disetujui Oleh,
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DALAM PROSES
AKSESI KE *ORGANISATION FOR ECONOMIC
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)***

SKRIPSI

**Nurul Mustofa
07041382126194**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 19 Mei 2025**

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, M.M.
Pembimbing Utama

Muh. Nizar Sohyb, S.IP., M.A.
Pembimbing II

Yuniarsih Manggarsari, S.Pd., M.Pd.
Ketua Penguji

Yuni Permatasari, S.IP., M.H.I.
Anggota Penguji

(Handwritten signatures of the examiners)

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Ketua Jurusan,
Ilmu Hubungan Internasional



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Mustofa
NIM : 07041382126194
Tempat dan Tanggal Lahir : Musi Banyuasin, 14 Agustus 2003
Fakultas/ Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Kebijakan Ekonomi Indonesia Dalam Proses Akses Ke
*Organisation For Economic Co-Operation and
Development (OECD)*

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Kebijakan Ekonomi Indonesia Dalam Proses Akses Ke *Organisation For Economic Co-Operation and Development (OECD)*" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/ atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 21 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Nurul Mustofa
NIM. 07041382126194

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa hormat dan cinta, karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayah “Heru” dan Ibu “Iriyani”, Kakakku “Faisal J.Pramono dan Rini Purnama Sari”, serta Kakek dan Nenekku “Alm.Kasman dan Wathinem” dan tidak lupa Adik kecil kesayangan “Adelia P.Indriyani dan Qikanaya C.Arfaisal” yang menjadi alasan terbesarku untuk tidak menyerah. Segala doa, pengorbanan dan ketulusan yang kalian berikan telah menjadi cahaya dalam setiap langkahku, bahkan di saat dunia terasa begitu berat. Di balik setiap halaman dalam skripsi ini, ada cerita panjang tentang perjuangan, kegagalan, ketidakpastian dan tekad untuk terus maju, yang tidak mungkin kulalui tanpa kehadiran dan dukungan kalian.

Tidak lupa, persembahan ini juga untuk diri sendiri, yang meski sering kali goyah, tetap memilih bertahan dan berjuang hingga mencapai titik ini. Semoga setiap langkah ke depan menjadi bentuk rasa syukur atas semua kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan.

ABSTRAK

Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat posisi ekonomi global, Indonesia telah melibatkan diri dalam proses akses ke *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga menuntut adanya penyesuaian kebijakan ekonomi secara menyeluruh sesuai standar dan prinsip yang ditetapkan oleh OECD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekonomi Indonesia beradaptasi dalam proses akses ke OECD sebagai wujud upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan ekonomi nasional. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini melihat interaksi antara tuntutan OECD dan respons kebijakan domestik Indonesia melalui pendekatan *Neo-Liberal Institutionalism*, yang menekankan pentingnya institusi internasional dalam membentuk kerja sama lintas negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa akses mendorong Indonesia untuk mempercepat harmonisasi regulasi, memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan daya saing ekonomi. Namun tantangan yang muncul mencakup kebutuhan reformasi struktural, kesiapan institusi domestik dalam memenuhi standar internasional serta potensi resistensi terhadap reformasi kebijakan. Penulis menilai bahwa perlu adanya penguatan komitmen politik di tingkat pusat, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kesiapan regulasi domestik, serta konsistensi dalam penerapan kebijakan yang selaras dengan standar OECD. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama antar lembaga, menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar proses akses dapat berjalan lebih lancar dan membawa perubahan nyata bagi perbaikan sistem ekonomi nasional.

Kata Kunci: Kebijakan Ekonomi, Akses, OECD, Institusional, Harmonisasi Regulasi

Pembimbing 1,

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, M.M.
NIP. 196002091986031004

Pembimbing 2,

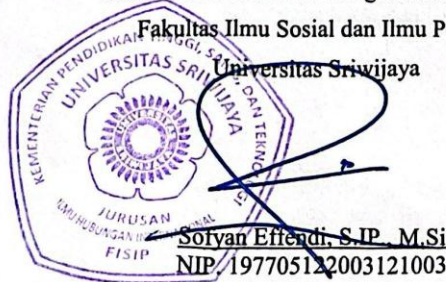
Muh. Nizar Sohyb, S.IP., M.A.
NIP. 199301072023211022

Palembang, 21 Mei 2025

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Solvan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

As part of its efforts to strengthen its global economic position, Indonesia has engaged in the accession process to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), which is not merely symbolic but also demands comprehensive adjustments to economic policies in accordance with OECD standards and principles. This study aims to analyze how Indonesia's economic policies adapt during the OECD accession process as part of an effort to enhance transparency and accountability in the governance of the national economy. Using a qualitative descriptive method, this research examines the interaction between OECD demands and Indonesia's domestic policy responses through the lens of Neo-Liberal Institutionalism, which highlights the role of international institutions in shaping cross-country cooperation. The analysis shows that the accession process encourages Indonesia to accelerate regulatory harmonization, strengthen institutional capacity, and improve economic competitiveness. However, several challenges remain, including the need for structural reforms, the readiness of domestic institutions to meet international standards, and potential resistance to policy reforms. The author argues that it is necessary to strengthen political commitment at the central level, improve inter-agency coordination, enhance the readiness of domestic regulations, and ensure consistency in policy implementation aligned with OECD standards. Therefore, it is crucial for Indonesia to continue strengthening institutional collaboration, maintain consistent policy execution, and enhance human resource capacity so that the accession process can proceed more smoothly and bring about real improvements to the national economic system.

Keywords: *Economic Policy, Accession, OECD, Institutional, Regulatory Harmonization*

Advisor 1,

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, M.M.
NIP. 196002091986031004

Advisor 2,

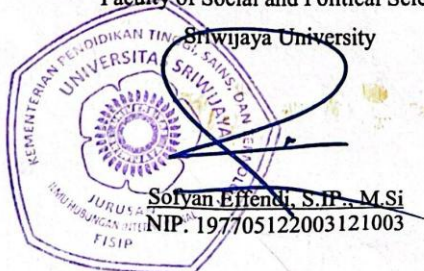
Muh. Nizar Sohyb, S.IP., M.A.
NIP. 199301072023211022

Palembang, 21 May 2025

Head of International Relations Department

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University



Sorvan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta kesehatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini hingga tuntas.
2. Kepada kedua orang tua penulis Ayah Heru dan Ibu Iriyani, terima kasih yang tak terhingga atas setiap doa, dukungan tanpa batas, segala fasilitas dan pengorbanan yang menjadi pondasi langkah selama menempuh pendidikan.
3. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.
4. Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
5. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, M.M. dan Bapak Muh. Nizar Sohyb, S.IP., M.A. atas bimbingan, arahan dan kesabaran dalam mendampingi penulis selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Dosen penguji, Miss Yuniarsih Manggarsari, S.Pd., M.Pd. dan Miss Yuni Permatasari, S.IP., M.H.I., atas masukan dan saran yang sangat berharga dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika di lingkungan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi.
8. Kakak tersayang, Rini Purnama Sari, S.Pd., Gr. dan Faisal J. Pramono, yang telah

menjadi tempat berbagi, berkeluh kesah sekaligus memberi dukungan penuh dalam segala hal.

9. Adik-adik tercinta, Adelia P. Indriyani dan Qikanaya Citra Arfaisal, yang selalu menjadi semangat tersendiri bagi penulis.
10. Sepupu terbaik, Ike Seftiyana, S.M., atas doa dan motivasinya.
11. Sahabat-sahabat "Nazmyera Kos", Bang Nopal, Izy, Dwi, Cua, Luki, dan Gita yang telah menciptakan suasana penuh kekeluargaan dan menjadi tempat berbagi cerita bersama serta keluh kesah selama masa perkuliahan.
12. Kepada teman teman baik penulis, Geva, Dhea, Redho, Kale, Reshan, Veera, Kevin, Gio, Mahes, yang selalu memberi afirmasi positif dan hal baik lainnya.
13. Untuk teman-teman Kejar Mimpi Palembang, terima kasih telah menjadi bukti bahwa mimpi bisa dikejar bareng-bareng, sambil ketawa dan tetap waras.
14. Kepada keluarga *Rotaract Club*, yang selalu punya cara unik buat ngajarin arti kepedulian tanpa harus banyak teori.
15. Untuk diriku sendiri, terima kasih. Karena telah melewati banyak hal tidak semua orang tahu yang sudah tidak menyerah, meski sempat ingin berhenti. *I am proud of how far I've come, and I trust myself to keep going.*

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan kajian di bidang Hubungan Internasional, sekaligus menjadi refleksi dari proses pembelajaran yang telah penulis jalani selama masa studi. Penulis mengharapkan adanya masukan dan saran demi penyempurnaan dan penguatan isi skripsi ini.

Palembang, 21 April 2025



Nurul Mustofa
NIM. 07041382126194

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PRNGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABTSRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian Objektif.....	10
1.3.2 Tujuan Penelitian Subjektif.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Kerangka Teori/ Konseptual.....	18
2.2.1 <i>Neoliberal Institutionalism</i>	18

2.3	Alur Pemikiran.....	22
2.4	Argumentasi Utama.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		24
3.1	Desain Penelitian.....	24
3.2	Definisi Konsep.....	24
3.3	Fokus Penelitian.....	27
3.4	Unit Analisis.....	28
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5.1	Jenis Data.....	29
3.5.2	Sumber Data.....	29
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6.1	<i>Library Research</i>	30
3.6.2	Metode Dokumentasi.....	30
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	30
3.7.1	Sumber.....	31
3.7.2	Metode.....	31
3.7.3	Teori.....	31
3.8	Teknik Analisa Data.....	31
3.8.1	Reduksi Data.....	32
3.8.2	Penyajian Data.....	32
3.8.3	Penarikan Kesimpulan.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM.....		34
4.1	Profil <i>Organisation For Economic Co-Operation and Development</i>	34
4.2	Sejarah Hubungan Kerjasama Indonesia – OECD.....	35
4.3	Proses Akses Indonesia Ke OECD.....	36

4.3.1	Pra-Akses	37
4.3.2	Akses	38
4.3.3	Pasca-Akses	39
4.4	Posisi Indonesia di OECD	40
4.4.1	Indonesia Sebagai Mitra Utama	41
4.4.2	Indonesia Sebagai <i>Bridge Builder</i>	43
4.5	Standar Keanggotaan OECD	44
4.5.1	Kemampuan, Kapasitas, dan Keterlibatan	45
4.5.2	Tata Kelola Ekonomi dan Publik	46
4.5.3	Pengaruh dan Partisipasi	49
4.6	Prinsip – Prinsip OECD	50
4.6.1	Dasar Kerangka Tata Kelola Yang Efektif	51
4.6.2	Hak dan Perlakuan Adil Bagi Pemegang Saham	52
4.6.3	Peran Investor Institusional, Pasar Modal dan Perantara Keuangan	53
4.6.4	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Perusahaan	54
4.6.5	Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Keterbukaan	55
4.6.6	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		58
5.1	<i>Institutional Cooperation</i>	58
5.1.1	Pembentukan dan Peran Utama (Tim Nasional OECD)	58
5.1.2	Mekanisme Koordinasi dan Perumusan Kebijakan	63
5.1.3	<i>Output</i> dan Capaian dalam Mendukung Akses	64
5.2	<i>Regulatory Aligment</i>	66
5.2.1	Reformasi Kebijakan Perpajakan dan Fiskal	66
5.2.2	Investasi Asing dan Perdagangan Internasional	73

5.2.3	Penguatan Regulasi Persaingan Usaha dan Anti-Monopoli.....	80
5.2.4	Tata Kelola BUMN dan Reformasi Subsidi Energi.....	86
5.3	<i>Economic Competitiveness</i>	93
5.3.1	Potensi Hilangnya <i>Special and Differentiated Treatment</i>	94
5.3.2	<i>Anti-Bribery Convention</i>	97
5.3.3	Penyederhanaan Regulasi.....	100
5.3.4	Liberalisasi Perdagangan dan Investasi	102
5.4	Respons Indonesia Dalam Resiko Perdagangan Internasional.....	107
5.4.1	Peninjauan Kebijakan Tarif Negara Mitra Dagang.....	107
5.4.2	Strategi Indonesia Menghadapi Proteksionisme Global.....	112
	BAB VI PENUTUP	118
6.1	Kesimpulan.....	118
6.2	Saran.....	120
	DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 1.2 Alur Pemikiran.....	22
Tabel 1.3 Fokus Penelitian.....	27
Tabel 1.4 Tim Nasional OECD Dalam Proses Akses.....	60
Tabel 1.5 Penyesuaian Regulasi Investasi dan Perdagangan Internasional.....	69
Tabel 1.6 Harmonisasi Kebijakan Perpajakan dan Fiskal Indonesia.....	76
Tabel 1.7 Reformasi Kebijakan Anti-Monopoli Dalam Persaingan Usaha.....	84
Tabel 1.8 Kebijakan Dalam Mengatasi Masalah Tata Kelola BUMN dan Energi.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gambar Kinerja Perdagangan Indonesia-OECD.....	4
Gambar 1.2	Ekspor Komoditas Primer Indonesia Ke Jepang, Korea Selatan dan AS.....	5
Gambar 1.3	Pertumbuhan PDB Indonesia	6
Gambar 1.4	Dampak Investasi Indonesia dengan Negara OECD.....	9
Gambar 1.5	Profil OECD.....	34
Gambar 1.6	Indonesia Sebagai Mitra Utama OECD.....	42
Gambar 1.7	Defisit Fiskal Indonesia Kembali di Bawah 3% PDB.....	68
Gambar 1.8	Tingkat Hambatan Non-tarif di Berbagai Negara.....	74
Gambar 1.9	Komposisi dan Perkembangan Sumber Energi Global (1990-2020).....	88
Gambar 1.10	Ekspor Indonesia ke OECD Berdasarkan Produk.....	110

DAFTAR SINGKATAN

ACFTA	: <i>ASEAN-China Free Trade Agreement</i>
ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APEC	: <i>Asian-Pasific Economic Cooperation</i>
APINDO	: Asosiasi Pengusaha Indonesia
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BI	: Bank Indonesia
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DSB	: <i>Dispute Settlement Body</i>
FCA	: <i>Framework of Cooperation Agreement</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
G20	: <i>Group of Twenty</i>
GSP	: <i>Generalized System of Preferences</i>
HPP	: Harmonisasi Peraturan Perpajakan
IA-CEPA	: <i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
IJEPA	: <i>Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
INA	: <i>Indonesia Investment Authority</i>
ISO	: <i>International Organization for Standardization</i>
JETP	: <i>Just Energy Transition Partnerships</i>
JWP	: <i>Joint Work Program</i>
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi

KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
NK	: Neraca Komoditas
NTM	: <i>Non-Tariff Measures</i>
OECD	: <i>Organisation For Economic Co-Operation And Development</i>
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
RCEP	: <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
SARP	: <i>Southeast Asia Regional Programme</i>
S&DT	: <i>Special and Differentiated Treatment</i>
STRI	: <i>Services Trade Restrictiveness Index</i>
UMKM	: Unit Mikro Kecil dan Menengah
USD	: <i>United States Dollar</i>
USITC	: <i>United States International Trade Commission</i>
UU	: Undang-Undang
UUCK	: Undang-Undang Cipta Kerja
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang telah lama terlibat aktif dalam berbagai organisasi internasional yang berfokus pada bidang ekonomi dan perdagangan internasional. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara lain melalui berbagai forum internasional, baik di tingkat regional maupun global. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi seperti *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), *Group of Twenty* (G20), *Asian-Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang mendorong integrasi ekonomi, perdagangan dan kerjasama investasi baik di kawasan Asia-Pasifik maupun global (Kemenko Perekonomian, 2023). Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam forum lainnya seperti IMF dan Bank Dunia yang berperan penting dalam stabilitas ekonomi global dan mendukung kebijakan pembangunan ekonomi domestik.

Selain keterlibatannya dalam organisasi regional dan multilateral, Indonesia juga berkomitmen untuk terus memperkuat posisinya dalam dunia perdagangan internasional dengan menjalin kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara maju. Salah satu upaya yang ditempuh Indonesia adalah dengan melalui kerjasama dengan OECD (Jatmiko, 2023). OECD sendiri menjadi salah satu organisasi yang membantu negara-negara menyusun kebijakan ekonomi agar lebih siap menghadapi persaingan global. Sebagai negara berkembang seperti Indonesia, kerjasama dengan OECD menjadi peluang besar dalam memperbaiki kebijakan ekonomi dalam negeri agar sesuai dengan standar internasional, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperkuat sistem perekonomian nasional (Limanseto, 2024).

Kebutuhan untuk melakukan harmonisasi kebijakan dalam negeri dengan prinsip-prinsip OECD menjadi penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengikut dalam sistem global, tetapi juga memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan arah dan substansi kebijakan ekonomi internasional. Harmonisasi ini tentunya tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menyentuh aspek substansial seperti reformasi regulasi, penegakan hukum dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai contoh nyata mengenai belum optimalnya harmonisasi kebijakan nasional dengan prinsip-prinsip OECD dapat ditemukan dalam kebijakan ekspor pasir laut yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023. Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak karena dikeluarkan tanpa konsultasi publik yang memadai dan dianggap tidak mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kebijakan tersebut dinilai berpotensi merusak ekosistem laut dan bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang juga menjadi bagian dari norma kebijakan OECD. Adanya kasus tersebut telah menunjukkan masih adanya kesenjangan antara praktik perumusan kebijakan di Indonesia dan standar tata kelola yang ingin dicapai melalui proses akses keanggotaan OECD (Juwana, 2024).

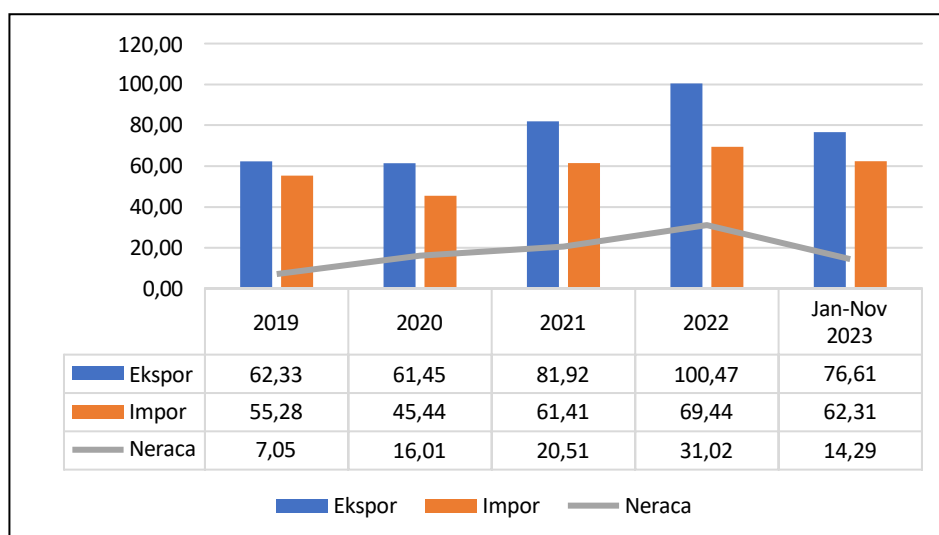
Hubungan Indonesia dan OECD dimulai pada 2007 melalui program *enhanced engagement* yang membuka jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan panduan kebijakan dari negara-negara anggota OECD. Pada 2012, kerjasama ini diperkuat dengan *Framework of Cooperation Agreement* yang diperbarui setiap lima tahun. *Framework* tersebut dijalankan melalui *Joint Work Program (JWP)* yang fokus pada pembenahan kebijakan di bidang sosial, investasi, infrastruktur dan pengelolaan ekonomi (Jayadi, 2022). Pada tahun 2015, Indonesia menjadi semakin terhubung dengan OECD melalui pembukaan kantor perwakilan OECD di Jakarta. Melalui hubungan tersebut, Indonesia tidak hanya berpeluang memperbaiki kebijakan ekonomi

yang lebih baik di dalam negeri, tetapi juga meningkatkan posisi daya tawar politik sebagai satu satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara (Mulyana, 2023).

Peran utama OECD sendiri adalah membantu anggotanya meningkatkan standar ekonomi global melalui panduan kebijakan dan mendukung tata kelola ekonomi yang lebih transparan dan efisien. Proses akses keanggotaan OECD sendiri bukanlah hal yang sederhana. Negara yang ingin bergabung harus melalui serangkaian penyesuaian kebijakan ekonomi yang mencakup isu perdagangan ekspor-impor, investasi, persaingan usaha, perpajakan, kebijakan fiskal dan moneter, penyelarasan standar pelaporan keuangan, reformasi kebijakan subsidi energi dan penguatan regulasi anti-korupsi, tata kelola BUMN, peningkatan berbagai instrumen, hingga reformasi struktural lainnya (Kemenkeu, 2023). Proses akses ini selaras dengan upaya Indonesia untuk memperkuat regulasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah bisnis dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung pencapaian tujuan besar Visi Indonesia Emas 2045 (Limanseto, H., 2024).

Indonesia sendiri telah resmi mengajukan akses keanggotaan OECD pada 14 Juli 2023 dan menjadi perwakilan pertama dari Asia Tenggara yang diterima untuk proses akses pada 20 Februari 2024 (Dewi, 2024). Hingga kini, status akses Indonesia sejajar dengan negara lain seperti Argentina, Brazil dan Bulgaria dalam proses menuju keanggotaan penuh. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menjadi anggota penuh pada 2027, dengan berpedoman pada Peta Jalan Akses (*Accession Roadmap*) yang diberikan OECD pada Mei 2024 dalam pertemuan *Ministerial Council Meeting* di Paris (Wildan, 2024). *Roadmap* ini dirancang untuk membantu agar kebijakan ekonominya sejalan dengan standar internasional OECD. Selama proses akses, upaya Indonesia akan dievaluasi secara ketat oleh OECD untuk memastikan semua reformasi yang diperlukan berjalan sesuai dengan standar dan target yang telah disepakati.

Dalam forum internasional, Indonesia berperan sebagai *bridge builder* dalam menjembatani kepentingan antara negara maju dan berkembang serta rivalitas di antara kekuatan dunia (Mulyana, Dr. Yayan G. H., 2024). Peluang akses Indonesia ke OECD dapat membuka akses yang lebih luas terhadap pasar negara-negara anggota serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Dengan penyesuaian kebijakan yang sejalan dengan standar OECD, Indonesia berpotensi memperbaiki neraca perdagangan, terutama melalui peningkatan ekspor sektor prioritas seperti manufaktur, agribisnis dan produk berteknologi tinggi (kemendag RI, 2024). Hal ini dapat menjadi strategi untuk mendorong surplus perdagangan yang lebih konsisten sebagaimana terlihat dalam neraca perdagangan Indonesia - OECD pada 2019–2023.



Gambar 1.1 Kinerja Perdagangan Indonesia - OECD

Sumber: (Kementerian Perdagangan, 2024)

Berdasarkan data pada grafik, neraca perdagangan Indonesia dengan negara anggota OECD menunjukkan tren positif selama periode 2019 hingga November 2023. Nilai ekspor secara konsisten lebih tinggi daripada impor yang mengindikasikan surplus perdagangan pada setiap tahun. Peningkatan surplus terlihat jelas pada tahun 2021 dan 2022 yang dimana neraca mencapai masing-masing 20,51 miliar USD dan 31,02 miliar USD. Namun, pada periode Januari–November 2023, surplus menurun

cukup signifikan menjadi 14,29 miliar USD. Penurunan ini terjadi seiring dengan menurunnya nilai ekspor dari 100,47 miliar USD pada 2022 menjadi 76,61 miliar USD, meskipun impor tetap relatif stabil pada angka 62,31 miliar USD. Hal ini menunjukkan perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Komoditas primer dan setengah jadi	Jepang	Korea Selatan	Amerika Serikat
Batu Bara	6,6 miliar	4,09 miliar	16,4 juta
Nikel Olahan	1,03 miliar	11,3 juta	5,9 juta
Kayu	731 juta	386,1 juta	475,1 juta
Karet	738,1 juta	114 juta	1,6 miliar
Kertas	373,3 juta	212 juta	264,4 juta
CPO	115,4 juta	224 juta	1,9 miliar
Tembakau	103,7 juta	32,1 juta	195,5 juta
Kopi	63,6 juta	13,4 juta	319,5 juta
Biji Cokelat	20,3 juta	4 juta	121,8 juta
Besi dan Baja	16,7 juta	309,1 juta	126,2 juta

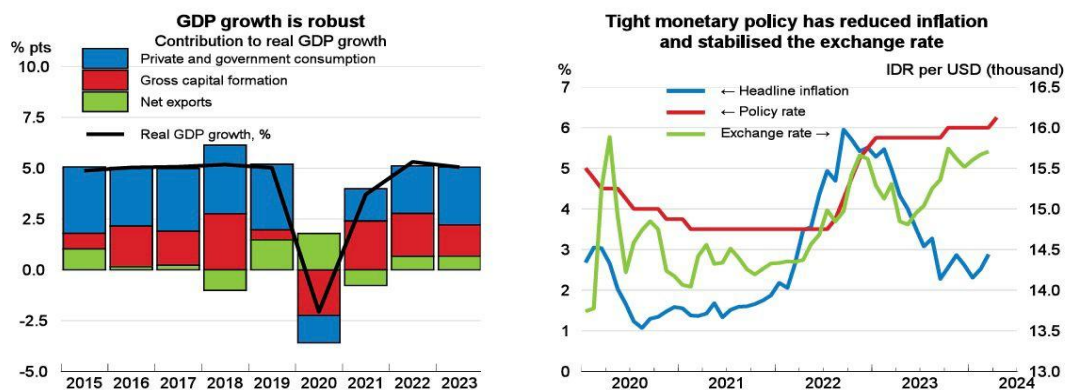
Gambar 1.2 Ekspor Komoditas Primer Indonesia Ke Jepang, Korea Selatan dan AS

Sumber: (Survei Ekonomi OECD, 2024)

Ketegangan geopolitik global, terutama akibat invasi Rusia ke Ukraina, membawa dampak campuran bagi Indonesia. Di satu sisi, harga energi, pangan dan pupuk melonjak sehingga menekan daya beli masyarakat. Namun, di sisi lain, kenaikan harga komoditas unggulan seperti batu bara, CPO dan logam justru mendorong penguatan neraca perdagangan Indonesia. Meski perdagangan global melambat akibat konflik dagang negara besar, Indonesia masih diuntungkan berkat tingginya permintaan terhadap komoditas ekspornya (Kharina, 2022). Struktur ekspor Indonesia yang dominan berbasis sumber daya alam seperti batu bara, minyak sawit, bijih besi, emas dan nikel yang memberikan kontribusi besar dengan perhitungan indeks harga yang disesuaikan berdasarkan porsi ekspor tahun 2021. Selain itu, Indonesia relatif tidak terlalu terdampak oleh konflik Laut Merah dibandingkan negara Asia lain karena proporsi perdagangan dengan Eropa hanya sekitar 11% ekspor dan 5% impor (OECD,

2024). Dalam hal ini, arah kebijakan yang didorong oleh OECD menjadi relevan, khususnya dalam mendukung hilirisasi dan keberlanjutan ekspor komoditas.

Surplus perdagangan yang berkelanjutan ini tidak hanya mencerminkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian domestik. Kinerja positif neraca perdagangan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor bersih yang merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan PDB. Untuk mendukung keberlanjutan, Indonesia perlu memperkuat cadangan devisa, menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil dan mengalokasikan anggaran yang lebih efektif untuk mendukung investasi di sektor-sektor yang produktif dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi (OECD, 2022). Langkah tersebut penting untuk memastikan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan global, seperti fluktuasi harga komoditas dan tekanan ekonomi eksternal. Dengan stabilitas ekonomi yang terjaga, pemerintah dapat menciptakan lingkungan lebih kondusif bagi investasi (Kementerian Keuangan, 2024).



Gambar 1.3 Pertumbuhan PDB di Indonesia

Sumber: (OECD Economic Outlook, 2024)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dengan kontribusi utama berasal dari konsumsi pemerintah, swasta, pembentukan modal dan ekspor bersih. Proyeksi pertumbuhan PDB sebesar 5,1% pada 2024 dan 5,2% pada 2025 menunjukkan pemulihan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan moneter

ketat yang diterapkan berhasil mengurangi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, seperti yang terlihat dari penurunan *headline inflation* dan kestabilan *kurs* rupiah terhadap dolar AS (Charlotte Edmond, 2024). Dalam aksesinya, reformasi kebijakan ekonomi dan tata kelola yang sejalan dengan standar internasional OECD, diyakini dapat meningkatkan investasi asing dan daya saing ekonomi Indonesia.

Akses ke OECD tidak hanya membawa potensi dalam reformasi kebijakan dan tata kelola ekonomi untuk meningkatkan investasi asing dan daya saing, tetapi juga membuka peluang besar bagi sektor-sektor strategis, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian domestik. Dengan menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 61% terhadap PDB pada 2023 menjadikan UMKM sebagai peran vital dalam menopang ekonomi domestik (Dewi, 2024). Namun, berbagai tantangan seperti rendahnya daya saing produk, kebijakan pendampingan yang tidak terkoordinasi dan biaya logistik yang tinggi membatasi kontribusi UMKM terhadap ekspor yang saat ini hanya sebesar 15,7%. Hal ini disebabkan banyak UMKM yang belum terintegrasi dengan rantai pasok global, kurang memanfaatkan teknologi digital dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar kualitas internasional. Banyaknya hambatan tersebut menjadikan peran UMKM dalam mendorong ekspor ke negara-negara maju masih relatif kecil.

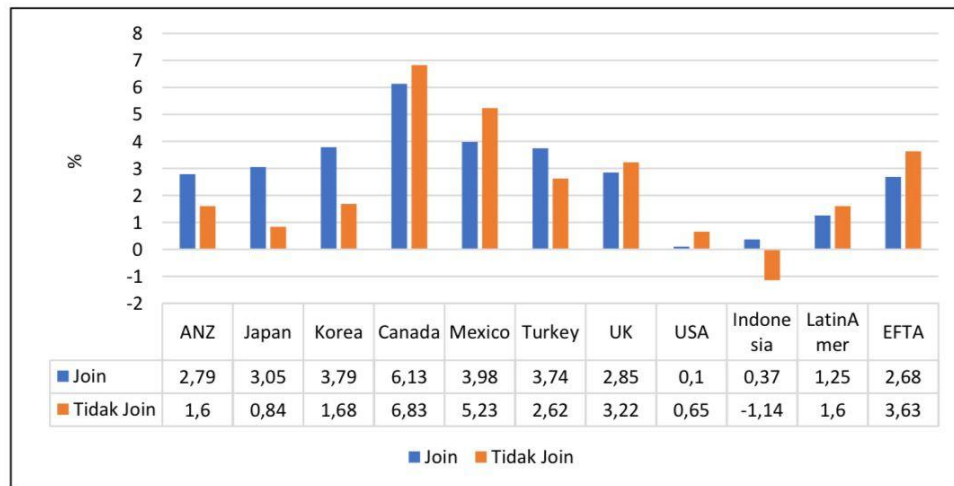
Selain itu, yang dihadapi Indonesia dalam proses akses ke OECD terletak pada penyesuaian kebijakan domestik agar sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan OECD, terutama proses penyederhanaan regulasi yang membutuhkan revisi dengan melibatkan berbagai sektor dan kementerian untuk menghindari adanya tumpang tindih dan potensi konflik kebijakan (Kemendag RI, 2024). Indonesia perlu meningkatkan investasi di bidang sumber daya manusia dan penelitian serta pengembangan (R&D) untuk mendorong diversifikasi ekonomi melalui produksi barang dan jasa bernilai

tambah. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah harus dikurangi dengan memperkuat sektor yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing global. Namun, hal ini bukan tanpa tantangan, mengingat sebagian besar aktivitas ekonomi di Indonesia masih ditopang oleh sektor UMKM dan informal yang cenderung kurang mendapatkan manfaat langsung dari liberalisasi ekonomi (Parlinggomon, 2024).

Dalam mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperkuat sektor yang berdaya saing global, Indonesia juga perlu memastikan kapasitas produksi dalam negeri mampu memenuhi permintaan pasar internasional, khususnya dari negara-negara OECD. Peningkatan ekspor ke pasar ini membutuhkan investasi yang besar, baik dalam infrastruktur maupun teknologi untuk memperbesar kapasitas produksi. Dalam rangka meningkatkan kapasitas tersebut, investasi domestik akan mengalami peningkatan, dimana jika Indonesia bergabung dengan OECD, maka hal ini dapat mendorong pertumbuhan investasi domestik hingga 0,37% (Kemendag RI, 2024). Selain itu, membuka akses yang lebih luas terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) dapat mempercepat transformasi ekonomi melalui aliran modal, transfer teknologi dan penguatan jaringan global.

Oleh karena itu, kepentingan Indonesia dalam keanggotaan OECD dianggap sebagai peluang utama untuk memperkuat legitimasi kebijakan domestik dan mempercepat reformasi struktural guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Di tengah tuntutan global terhadap tata kelola ekonomi yang transparan, akuntabel dan berbasis bukti, OECD menawarkan kerangka kebijakan yang dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, integritas fiskal, serta daya saing investasi (Sukmawati, 2023). Selain itu, posisi Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN yang sedang dalam proses aksesori menandai upaya diplomatik yang penting untuk memperluas peran dalam tatanan ekonomi global. Proses aksesori yang dimulai sejak

Januari 2023 telah memasuki tahap tinjauan teknis lintas sektor oleh 26 komite OECD, dengan evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan nasional terhadap lebih dari 200 instrumen hukum organisasi tersebut (OECD, 2023). Keikutsertaan penuh nantinya diproyeksikan mampu memperkuat kepercayaan investor dan membuka akses terhadap jejaring pengetahuan kebijakan tingkat tinggi.



Gambar 1.4 Dampak Investasi Indonesia dan Negara OECD

Sumber: (Kementerian Perdagangan RI, 2024)

Namun, walaupun salah satu potensi keuntungannya adalah meningkatnya minat investasi langsung (*foreign direct investment* atau FDI) yang dapat membuka akses lebih luas bagi Indonesia untuk menarik investor asing (Ulya Khasanah, 2023). Hal ini sekaligus menjadi kekhawatiran karena akses ini juga menuntut Indonesia untuk meliberalisasi berbagai undang-undang, terutama yang terkait dengan perizinan, persaingan usaha dan perdagangan. Liberalisasi ini berpotensi memperbesar kebebasan perdagangan, tetapi juga dapat memperkecil perlindungan terhadap usaha lokal, termasuk UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Selain itu, terdapat risiko bahwa keanggotaan Indonesia di OECD dapat menyebabkan hilangnya *special and differentiated treatment* (S&DT) dalam berbagai perundingan internasional yang selama ini memberikan keuntungan bagi negara berkembang seperti Indonesia (Cahyaningrum, D., 2023). Kekhawatiran negara

berkembang terkait penerapan ketentuan (S&D) *treatment* tidak hanya muncul karena keterbatasan kemampuan suatu negara, tetapi juga karena ketidakmampuan ketentuan S&D untuk ditegakkan secara hukum. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam implementasi kebijakan tersebut. Tidak mengikatnya ketentuan S&D secara hukum mengakibatkan negara berkembang tidak dapat memaksa negara maju untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu dan pada saat yang bersamaan mereka juga tidak mampu memperjuangkan hak-hak mereka berdasarkan ketentuan S&D (Hasanie, 2020).

Tantangan lainnya termasuk kebutuhan anggaran besar untuk memenuhi komitmen sebagai anggota dan potensi dampak negatif seperti akuisisi lahan oleh investor asing atau prioritas yang lebih besar pada perusahaan skala besar dibandingkan UMKM. Kontribusi sebagai *full member* akan dihitung menggunakan skala penilaian yang berbeda dari metode yang diterapkan di PBB. OECD dalam menentukan kontribusi keanggotaan akan dihitung berdasarkan jumlah populasi penduduk dan PDB. Oleh karena itu, meskipun keanggotaan OECD menawarkan peluang besar seperti peningkatan FDI, Indonesia perlu memastikan bahwa reformasi kebijakan yang dilakukan tetap mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Sekretariat Kabinet RI, 2024).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah penulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kebijakan Ekonomi Indonesia Dalam Proses Akses Ke *Organisation For Economic Co-Operation and Development* (OECD)?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Objektif

- a. Untuk menganalisis kebijakan ekonomi Indonesia dalam proses akses ke OECD serta pengaruhnya terhadap perekonomian domestik.

1.3.2 Tujuan Subjektif

- a. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana di program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- b. Memperluas teori dan aplikasinya khususnya dalam bidang kajian Ilmu Hubungan Internasional.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengkaji efektivitas kebijakan ekonomi yang diadopsi Indonesia dalam proses akses.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya ataupun penelitian serupa dalam studi lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi dosen, mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya terkait dampak akses OECD terhadap perekonomian Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan membantu pihak-pihak terkait, seperti pembuat kebijakan dan pelaku usaha dalam memahami tantangan serta peluang yang muncul dari keanggotaan OECD.

DAFTAR PUSTAKA

- AHRP. (2021). *Developments in the Indonesian Regulatory Framework for Foreign Direct Investment*. Retrieved from <https://www.ahrplaw.com/post/developments-in-the-indonesian-regulatory-framework-for-foreign-direct-investment>
- Alamsyah, M. N. (2012). Bayang-Bayang World Trade Organization (WTO) Dalam Kebijakan Desentralisasi Indonesia. *Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Tadulako* , 10.
- Aleander Whyte. (2012, 02 12). *Neorealism and neoliberal institutionalism: born of the same approach*. Retrieved 02 20, 2024, from <https://www.e-ir.info/2012/06/11/neorealism-and-neoliberal-institutionalism-born-of-the-same-approach/>
- Alliance, C. (2018, 03). *Join Work Programme On Migration and Cities*. Retrieved 12 06, 2024, from <https://www.citiesalliance.org/sites/default/files/Cities%20and%20Migration%20JWP%20Newsletter%20March%202018.pdf>
- Almi, A. A. (2022). Mencandra Akses Apostille Convention dalam Mendukung Birokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia. *Hukum Indonesia Law Journal* , 247.
- Alwi, Z. (2020). ALIRAN EKONOMI NEOLIBERALISME: SUATU PENGANTAR. *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)* , 03. No.2.
- Amandawati, P. (2024). *Menuju Era Kemajuan, Indonesia Siapkan Diri Gabung OECD*. Retrieved from <https://mum.id/news/menuju-era-kemajuan-indonesia-siapkan-diri-gabung-oecd>
- Apindo. (2025, 01 15). *APINDO dan Direktorat Jenderal Pajak Bangun Sinergi dalam Implementasi Coretax*. Retrieved from Asosiasi Pengusaha Indonesia: <https://apindo.or.id/media/apindo-dan-direktorat-jenderal-pajak-bangun-sinergi-dalam-implementasi-coretax>
- Arifa, S. N. (2025). *Airlangga Rayu Negara Mitra Percepat Proses Akses OECD Indonesia*. Retrieved 01 25, 2025, from <https://validnews.id/ekonomi/airlangga-rayu-negara-mitra-percepat-proses-aksesi-oecd-indonesia>
- Arikunto, S. (2010). *rosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta: Rineka Cipta.: Rineka Cipta.
- Aristama, F. (2024). *Akses ke OECD: Timbang-Timbang Relevansi, Peluang, dan Tantangan bagi Perpajakan Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2023). *Kesiapan Indonesia Dalam Proses Akses Menjadi Anggota OECD*. Retrieved 02 23, 2025, from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/534>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2024, 07 14). *Indonesia dan OECD Memperkuat Kerja Sama untuk Ekonomi yang Lebih Tangguh, Berkelanjutan, dan Inklusif*. Retrieved 12 03, 2024, from Badan Kebijakan Fiskal RI: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/07/14/4357-indonesia-dan-oecd-menguatkan-kerja-sama-untuk-ekonomi-yang-lebih-tangguh-berkelanjutan-dan-inklusif>

- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). *Siaran Pers: Manfaat Kesepakatan Sistem Perpajakan Internasional yang Baru Bagi Indonesia*. Retrieved from Badan Kementerian Keuangan RI: https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/siaran-pers/file/1627990261_Siaran%20Pers%20Manfaat%20Kesepakatan%20BEPS%20untuk%20Perpajakan%20Indonesia.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2024, 11 12). *Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD Indonesia*. (B. RI, Ed.) Retrieved 12 19, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/news/2024/11/12/635/rapat-koordinasi-tim-nasional-oecd-indonesia.html>
- Badan Standarisasi Nasional. (2021). *Kemendag Ajak Pelaku Usaha Ubah Tantangan Sertifikasi Jadi Peluang Tingkatkan Ekspor*.
- BKF. (2016). *Industri Minyak Indonesia Di Tengah Kemerosotan Harga Minyak Dunia*. Retrieved from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/warta-fiskal/file/edisi-1-2016.pdf>
- BKF Kemenkeu. (2015). *Kajian Mekanisme Kebijakan Subsidi BBM yang Lebih Tepat Sasaran*. Retrieved from Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/09/28/162748138132068-kajian-mekanismekebijakan-subsidi-bbm-yang-lebih-tepat-sasaran>
- BKPM. (2021). *Laporan Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun*. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta Selatan, Jakarta , Indonesia : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
- BPK RI. (2024). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas*. Retrieved 05 01, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/199375/perpres-no-32-tahun-2022>
- BPK RI. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 : Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- BPPK. (2022). *Reformasi Subsidi dan Kompensasi Energi*. Retrieved from Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-balikpapan/berita/reformasi-subsidi-dan-kompensasi-energi>
- BPS. (2024). *Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD Indonesia*. (B. P. Indonesia, Ed.) Retrieved 12 12, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/news/2024/11/12/635/rapat-koordinasi-tim-nasional-oecd-indonesia.html>
- BTI. (2025). *Ringkasan Eksekutif: Laporan Negara Brazil 2024*. Retrieved from BTI Transformation
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana.
- Cahyani, F. F. (2018). Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi Oecd On Combating Transnational Bribery Periode 2014-2017. *Journal of International Relations* , Vol.4 No.4 .
- Cahyaningrum, D. (2023, 11 05). *AKSELERASI KEANGGOTAN PENUH INDONESIA KE OECD*. Retrieved 10 30, 2024, from Pusat Analisis Keparlemenan: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://b>

erkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%2520Sepekan---I-PUSLIT-November-2023-191.pdf&ved=2ahUKEwi6s6nsy6CKAxXQTmwGHbTIGGoQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw0SPvDwONMci3bDted6_9

- Charlotte Edmond. (2024, 08 16). *Mengapa tawaran Indonesia dan Thailand untuk keanggotaan OECD bisa menjadi pengubah permainan*. (C. Edmond, Editor) Retrieved 10 25, 2024, from World Economic Forum: <https://www.weforum.org/stories/2024/08/indonesia-thailand-oecd-membership-economic-growth-southeast-asia/>
- Christina, R. (2023). *Larangan Praktik Monopoli Lengkap dengan Sanksinya*. Retrieved 01 28, 2025, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-praktik-monopoli-lengkap-dengan-sanksinya-lt64213618718fa/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Department of Psychology, Carnegie Mellon University.
- Darusalam, et al . (2014). *Rencana Aksi Base Erosion Profit Shifting Dan Dampaknya Terhadap Peraturan Pajak Di Indonesia* . Retrieved from DDTC Working Paper : <https://itrade.cgsi.co.id/bertemu-sekjen-oecd-airlangga-tegaskan-komitmen-ri-dalam-proses-aksesi>
- Denzin, N. K. (2009). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. 2009: SAGE Publications.
- Dewi. (2024). *Mengkaji Akses Indonesia Menuju OECD dalam Perspektif Masyarakat Sipil*. Jakarta Selatan, Jakarta, indonesia: Meliana Lumbantoruan.
- Dewi, A. F. (2024). In *MEMPERKUAT RUANG SIPIL (CIVIC SPACE) DALAM AKSESI INDONESIA MENUJU OECD* (p. 4). Jakarta Selatan Indonesia , Indonesia.
- Dianawati, E. (2021). Dampak Keputusan Dispute Settlement Body Terhadap Sengketa Aturan Impor Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat: Studi Kasus Pembatasan Impor Holtikultura, Hewan dan Produk Hewan. *Khatulistiwa Law Review* , Vol 2 No.1, 15.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2023). *Perbandingan Komponen dan Struktur Pajak OECD dan Government Finance Statistic Manual dan Pengaruhnya atas Pendefinisian Tax Ratio di Indonesia*. Retrieved from Kementerian Keuangan: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perbandingan-komponen-dan-struktur-pajak-oecd-dan-government-finance-statistic-manual-dan-pengaruhnya-atas-pendefinisiantax-ratio-di-indonesia&ved=2a>
- DPR RI. (2021). *Asumsi Dasar Ekonomi Makro*. Retrieved from Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dari Masa Ke Masa Sejak Pascareformasi: <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buku/public-file/buku-public-27.pdf>
- Febyani, Y. M. (2020). *ERAN AEOI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK INDONESIA*. Retrieved from URNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/>
- Flemes, D. (2019). *Brazil First, Climate Last: Bolsonaro's Foreign Policy*. Retrieved from https://pure.giga-hamburg.de/ws/files/21579927/gf_lateinamerik_1905_en.pdf

- Fuqoha. (2021). Harmonisasi Regulasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Diantara Kesejahteraan Sosial Dan Kepentingan Nasional. *JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS* , Vol.3 No.1 , 13.
- Hajar, W. A. (2023). *Anggota OECD Dukung Penuh Proses Akses Indonesia*. Indonesia : Konsultan Pajak Surabaya.
- Halizhah, N. (2024). Analisis Penerapan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission. *Media Hukum Indonesia (MHI)* , Vol. 2, No. 4.
- Hani, R. N. (2020). *Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat*. Retrieved 02 24, 2025, from Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
- Hariadi, D. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum* , Volume 9 Issue 3, 20.
- Harjowiryo, M. (2021). Studi Kasus Intervensi Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA, DAN KEBIJAKAN PUBLIK* , Vol.6, No.3, 25.
- Hasanie, A. S. (2020). Penerapan Ketentuan Special and Differential Treatment dalam World Trade Organization terhadap Pembangunan dan Perdagangan Internasional. *Uti Possidetis: Journal of International Law* , 1, 342-344.
- Hendayana, D. (2024). *Optimalisasi Penerapan Ekonomi Hijau (Green Economy) Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan*. Retrieved from Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Herdiansyah, H. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika). Jakarta Indonesia.
- Hidranto, F. (2023). *Meretas Jalan Jadi Anggota Penuh OECD*. (P. I. Indonesia, Ed.) Retrieved 12 26, 2024, from <https://chatgpt.com/?model=text-davinci-002-render&oai-dm=1>
- HIPS. (2023). *FDI (Foreign Direct Investment) dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang*. (Kav. E-Sidoarjo, Jawa Timur 61234 Indonesia) Retrieved from <https://safenlock.com/id/fdi-foreign-direct-investment-dan-pengaruhnya-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-negara-berkembang/#:~:text=FDI%20tidak%20hanya%20membawa%20modal,mendorong%20pembangunan%20ekonomi%20yang%20berkelanjutan>
- Huy Do et.al. (2024). *Amendments To The Competition Act Only One Step Towards A Truly Competitive Economy*.
- IKPI. (2020). *Prabowo Targetkan Peningkatan Tax Ratio hingga 15 Persen pada 2029*. Retrieved from Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
- IMF. (2024). *Operational Guidance Note On Program Design and Conditionality*. Retrieved from International Monetary Fund
- Immanuel, J. (2019). Analisis Prinsip-Prinsip Oecd Dalam Asean Governance Scorecard Terhadap Penghindaran Pajak. Vol.32 No.2, 30.
- Ine, M. M. (2023). Pecial And Differential Treatment (Sdt) In The Wto Agreements: A Rule-Based Approach. *Southwest University of Political Science and Law (SWUPL)* , 38.
- INFID. (2024). Civil Society Perspectives on Indonesia's Accession to the Organization for

- Economic Cooperation and Development (OECD). https://infid.org/wp-content/uploads/2024/07/ENG-Edited-Volume_-Civil-Society-Perspectives-on-Indonesias-Accession-to-the-OECD.pdf.
- Jackson, G. S. (2018). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. (Oxford University Press,.
- Jannah, M. A. (2025). *Erick Thohir Dapat Mandat Penuh Mengawasi BPI Danantara: Langkah Strategis Membawa Transformasi BUMN*. Retrieved 05 03, 2025, from <https://beritakini.co.id/detail/38080/erick-thohir-dapat-mandat-penuh-mengawasi-bpi-danantara-langkah-strategis-membawa-transformasi-bumn>
- Jatmiko, A. (2023, 02 23). *OECD, Sejarah Pendirian, Tujuan, dan Manfaat Menjadi Anggotanya*. Retrieved 03 19, 2025, from Ekonopedia: <https://katadata.co.id/ekonopedia/profil/65d863214a46b/oecd-sejarah-pendirian-tujuan-dan-manfaat-menjadi-anggotanya>
- Jayadi, F. (2022, 07 15). *Indonesia Perpanjang Kerjasama Dengan OECD Untuk Lima Tahun ke Depan*. Retrieved 11 01, 2024, from EmitenNews.com: <https://emitennews.com/news/indonesia-perpanjang-kerjasama-dengan-oecd-untuk-lima-tahun-ke-depan>
- Joharsoyo, Y. M. (2023). *Sri Mulyani: Pemerintah Bentuk Komite Nasional Dukung Proses Akses Indonesia Jadi Anggota OECD*. Retrieved 12 10, 2024, from <https://www.tempo.co/ekonomi/sri-mulyani-pemerintah-bentuk-komite-nasional-dukung-proses-aksesi-indonesia-jadi-anggota-oecd-133801>
- Juwana, S. (2024). ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN EKSTRAKSI DAN EKSPOR PASIR LAUT. In *Indonesia Ocean Justice Initiative*.
- Karen Mingst, W. N. (2017). *Essentials of International Relations*. UNIVERSIT Y OF C ALIFORNIA , DAVIS.
- Kemendag RI. (2024). *Analisis Dampak Keikutsertaan Indonesia Sebagai Anggota OECD*". Jakarta, Indonesia: Pusat kebijakan perdagangan internasional.
- Kemendag RI. (2024). *Kajian Laporan Hasil Analisis Dampak Keikutsertaan Indonesia Sebagai Anggota OECD*. Jakarta Selatan Indonesia, Indonesia.
- Kemenkeu. (2023). *Kesiapan Indonesia Dalam Proses Akses Menjadi Anggota OECD*. Retrieved from Badan Kebijakan Fiskal: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/534>
- Kemenkeu RI. (2023). *Kesiapan Indonesia Dalam Proses Akses Menjadi Anggota OECD*. Retrieved 12 05, 2024, from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/siaran-pers/file/1697005583_sp104-kesiapan_indonesia_dalam_proses_aksesi_menjadi_anggota_oecd.pdf
- Kemenkeu. (2025). *TINJAUAN EKONOMI, KEUANGAN, & FISKA: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global* (https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/tekf/file/1743063257_tekf_i_2025.pdf ed.). (M. A. Rahadian Zulfadin, Ed.) Badan Kebijakan Fiskal.
- Kemenko Perekonomian. (2023, 08 24). *Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi*. Retrieved 11 18, 2024, from www.ekon.go.id: file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-

terintegrasi_2024-12-12%2002_42_52.pdf

- Kemenko Perekonomian RI. (2020). *ASEAN Economic Community 2025: Masyarakat Ekonomi Asean*. Retrieved 03 23, 2025, from [https://meaindonesia.ekon.go.id/mea/#:~:text=Masyarakat%20Ekonomi%20ASEAN%20\(ASEAN%20Economic,pertumbuhan%20ekonomi%20untuk%20mencapai%20kemakmuran](https://meaindonesia.ekon.go.id/mea/#:~:text=Masyarakat%20Ekonomi%20ASEAN%20(ASEAN%20Economic,pertumbuhan%20ekonomi%20untuk%20mencapai%20kemakmuran)
- Kemenko Perekonomian. (2023). Surat Ekspresi Minat Indonesia untuk Bergabung dengan OECD.
- Kemenko Perekonomian. (2023). *Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Dukung Kolaborasi Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD*. Retrieved from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5734/wujudkan-visi-indonesia-emas-2045-kemenko-perekonomian-dukung-kolaborasi-percepatan-keanggotaan-indonesia-dalam-oecd>
- Kemenko RI. (2024). *Siaran Pers: Pemerintah Terus Maksimalkan Proses Akses OECD*. Retrieved from Kementerian Perekonomian Republik Indonesia.
- Kemensetneg RI. (2023). *Presiden Jokowi Terima Sekjen OECD Bahas Perkembangan Proses Akses OECD Indonesia*. (K. S. Indonesia., Ed.) Retrieved 03 15, 2025, from https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_terima_sekjen_oecd_bahas_perkembangan_proses_aksesi_oecd_indonesi
- Kementerian ESDM. (2023). *Percepat Transisi Energi, Dokumen Kebijakan dan Investasi CIPP Diluncurkan*. Retrieved from Kementerian Sumber Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
- Kementerian Keuangan . (2024). *MENINGKATKAN KERJASAMA ANTARA INDONESIA DAN OECD*. Retrieved from Badan Kebijakan Fiskal: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2012/09/28/110329688340587-meningkatkan-kerjasama-antara-indonesia-dan-oecd>
- Kementerian Keuangan. (2023). *Siaran Pers Kesiapan Indonesia Dalam Proses Akses Menjadi Anggota OECD*. Retrieved 03 29, 2025, from Kemenkeu Republik Indonesia : <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-Kesiapan-Indonesia-Dalam-Proses>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2023). *Akses Indonesia Ke OECD: Review Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya*. Retrieved from <http://repository.uki.ac.id/18361/1/AksesIndonesiaKeOECD.pdf>
- Kementerian PANRB. (2025, 03 25). *Percepat Akses ke OECD, Kementerian PANRB Bahas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berkualitas*. Retrieved 03 27, 2025, from Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/percepat-aksesi-ke-oecd-kementerian-panrb-bahas-penguatan-tata-kelola-pemerintahan-dan-pelayanan-publik-berkualitas>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Media Briefing: Perkembangan dan Proses Akses Indonesia Bergabung Menjadi Anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*. Retrieved from Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi: <https://www.deputi7.ekon.go.id/kegiatan/media-briefing-deputi-vii-proses-aksesi-indonesia-bergabung-menjadi-anggota-organization-for-econom>

- Kemlu. (2024). *Policy Brief: Akses Indonesia ke OECD: Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya*. Retrieved from https://kemlu.go.id/files/repositori/56625/1734334832675fd970a8000_juli_september2024.pdf
- Keohane, R. O. (1977). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston: Little, Brown. World Politics in Transition. Boston: Little, Brown.
- Keohane, R. O. (2011). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Pearson Education.
- Kharina, M. &. (2022). *Indonesia's Commodity Exports and Global Sustainability Standards: A Policy Review*. Center for Indonesian Policy Studies.
- KPPU RI. (2010). *Pedoman Pasal 25 Tentang Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan (Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha)*. Retrieved 04 18, 2025, from https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/219/5/128400136_file5.pdf
- Krasner, S. D. (1982). *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. *International Organization*, 36(2),.
- Limanseto, H. (2024, 11 29). *Indonesia Dorong Percepatan Akses OECD dan Integrasi Ekonomi ASEAN untuk Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan*. Retrieved 11 02, 2024, from Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6076/indonesia-dorong-percepatan-aksesi-oecd-dan-integrasi-ekonomi-asean-untuk-pertumbuhan-inklusif-dan-berkelanjutan>
- Lukmana Sari. (2023). *Menimbang Untung Rugi RI Gabung Keanggotaan OECD*. Retrieved from <https://katadata.co.id/finansial/makro/65dbc640507fe/menimbang-untung-rugi-ri-gabung-keanggotaan-oecd>
- Ma'arif, S. (2007). Neoliberalisme Strategi Kebijakan IMF. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* , Vol.2, No.3.
- Madjid, Z. (2025). *Syarat Mutlak jadi Anggota OECD, RI Harus Ikut Konvensi Anti-Suap*. Retrieved 04 21, 2025, from CNBC: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250210161538-4-609472/syarat-mutlak-jadi-anggota-oecd-ri-harus-ikut-konvensi-anti-suap#:~:text=Syarat%20Mutlak%20jadi%20Anggota%20OECD%2C%20RI%20Harus%20Ikut%20Konvensi%20Anti%2DSuap>
- Maftuchan, A. (2013). *G-20 dan Transparansi Perpajakan Global: Memperkuat Peran Indonesia dalam Penindakan Praktik Transfer Pricing*. Retrieved from theprakarsa: <https://repository.theprakarsa.org/media/publications/285237-g-20-dan-transparansi-perpajakan-global-bb679131.pdf>
- Mahadiansar et.al. (2021). Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Inovasi Kebijakan* , 11.
- Mahkamah Konstitusi. (2025). *RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA: Registrasi Nomor 58/PUU-VI/2008*. Retrieved from https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_sidang_perkara_58.pdf
- Mahkamah Konstitusi. (2023). *Salinan PUTUSAN nomor 41/PUU-XXI/2023*. Retrieved from https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/41_PUU-XXI_2023.pdf
- Moegiarso, S. (2025). *Pertemuan Bilateral Dengan Sekjen OECD, Menko Airlangga*

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, D. Y. (2023). *Akresi Indonesia ke OECD: Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya*. Jakarta Pusat, Indonesia : Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Mulyana, Dr. Yayan G. H. (2024). *Akresi Indonesia ke OECD:Reviu Strategis Geopolitik, Geoekonomi, dan Implikasinya*. (D. Y. Mulyana, Ed.) Jakarta Pusat 10110, Indonesia: Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Muttaqien, A. (2021). Pedoman Uji Tuntas Oecd Untuk Perilaku Bisnis Yang Bertanggung Jawab. In L. S. (ELSAM).

Nasution, A. N. (2025). Peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam Menjaga Keseimbangan Ekonomi Indonesia. *urnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol.3 No.2, 13-22.

National archief . (2022). *Undang-Undang Antimonopoli Sherman (1890) AS*. Retrieved 03 20, 2025, from <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://translate.google.com/translate%3Fu%3Dhttps://www.archives.gov/milestone-documents/sherman-anti-trust-act%26hl%3Did%26sl%3Den%26tl%3Did%26client%3Dsrp&ved=2ahUKEwiK-OX31ZGNAXioWMGHU>

NBER. (2025). *Seberapa Besar Keuntungan Ekonomi AS dari Perdagangan?* Retrieved from Biro Riset Ekonomi Nasional: <https://www-nber-org.translate.goog/digest/apr18/how-large-are-us-economys-gains-trade>

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education Limited.

Novia, F. (2024). *Melihat Sejarah Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Negara Lain*. Retrieved 05 01, 2025, from <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-sejarah-hukum-persaingan-usaha-di-indonesia-dan-negara-lain-lt67109d0c8c834/%23::~text%3DTujuan%2520kehadiran%2520UU%2520ini%2520adalah,tidak%25>

Nurfalah, F. (2024). *Penjelasan Tentang Etika Bisnis: Prinsip dan Penerapan*. Retrieved 02 02, 2025, from Telkom University: <https://bba.telkomuniversity.ac.id/penjelasan-tentang-etika-bisnis-prinsip-dan-penerapan/#:::text=Dengan%20menerapkan%20prinsip%2Dprinsip%20etika,dan%20memastikan%20operasi%20yang%20berkelanjutan.>

OCED Concil. (2023). Meeting Summary: Discussion on Indonesia's Accession Process. Paris: OECD Secretariat.

OECD . (1999). *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*. Retrieved from <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0293>

- OECD. (2023). *Accession Process of Indonesia*. Retrieved from OECD Outlook: Retrieved from: <https://www.oecd.org/indonesia/accession>
- OECD. (2022). *Accession to the OECD: Key benefits of joining the OECD and Steps towards membership*. Retrieved from <https://www.oecd.org/en/about/legal/oecd-accession-process.html#:~:text=Accession%20discussions%20are%20currently%20underway,from%20the%20region%20to%20start>
- OECD. (2021). *Building Capacity for Evidence-Informed Policy-Making*. Retrieved 03 28, 2025, from https://www.oecd.org/en/publications/building-capacity-for-evidence-informed-policy-making_86331250-en.html
- OECD. (2023). *Framework for the Consideration of Prospective Members*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Kajian Kebijakan Investasi OECD INDONESIA*. (P. OECD Publishing, Ed.) Retrieved from https://www.oecd.org/content/dam/oecd/id/publications/reports/2020/12/oecd-investment-policy-reviews-indonesia-2020_be45a0c6/4f7e8fad-id.pdf
- OECD. (2021). *Kajian Kebijakan Investasi OECD Indonesia 2020*. OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/4f7e8fad-id>.
- OECD. (2024, 02 18). *Ministers welcome Roadmap for accession discussions with Indonesia*. Retrieved 4 12, 2025, from <https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2024/05/ministers-welcome-roadmap-for-accession-discussions-with-indonesia.html>
- OECD. (2025). *OECD Economic Outlook, Interim Report March 2025*. Retrieved from OECD Economic Outlook: <https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook-interim-report-march-2025>
- OECD. (2022). *OECD Spending Better Framework: PUBLIC GOVERNANCE DIRECTORATE COMMITTEE OF SENIOR BUDGET OFFICIALS*. OECD Publishing, Paris, [https://one.oecd.org/document/GOV/SBO\(2022\)6/REV1/en/pdf](https://one.oecd.org/document/GOV/SBO(2022)6/REV1/en/pdf).
- OECD. (2024). *Policy Brief : Key Benefits of OECD Membership*. Retrieved from <https://porezna-uprava.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/en/Documents/Key%20Benefits%20of%20OECD%20Membership.pdf>
- OECD. (2024, 01 10). *Summary of Costa Rica's OECD Post-Accession Progress*. OECD Publishing. Retrieved 2025, from <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/legal/post-accession-report/Costa-Rica-oecd-post-accession-report-2024.pdf>
- OECD. (2024). *Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024*. In P. OECD Publishing. OECD Publishing, Paris <https://doi.org/10.1787/9d9fdbd2-id>.
- OECD. (2024). *Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024*. OECD Economic Surveys, OECD Publishing, Paris.
- OECD. (2012). *The OECD Regulatory Reform Review of Indonesia*. Retrieved 04 16, 2025, from https://www.oecd.org/en/publications/the-oecd-regulatory-reform-review-of-indonesia_5k97785rddxv-en.html
- OJK. (2021). *PERJALANAN SATU DASAWARSA BAKTI OJK BAGI NEGERI KIPRAH DAN PERJUANGAN PIMPINAN OJK*.

- Pambudi, H. (2020). *Perjalanan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan*. Retrieved from Kementerian Keuangan RI.
- Parlinggomon, B. (2024). Mengkaji Akses Indonesia Menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Perspektif Masyarakat Sipil. In B. Buchori (Ed.). Meliana Lumbantoruan.
- Pasaribu, J. (2023). *Apa Saja Industri Energi? Ini Daftar Lengkap Klaster BUMN*. Retrieved 03 16, 2025, from <https://listrikindonesia.com/detail/10820/apa-saja-industri-energi?-ini-daftar-lengkap-klaster-bumn>
- Perdana, R. P. (2024). Peran Indonesia Investment Authority (Ina) Selaku Sovereign Wealth Fund (Swf) Dalam Mendukung Program Transisi Energi Di Indonesia. *urnal Darma Agung* , Vol.32 No.6, 15.
- Permana, S. H. (2020). Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Indonesia. *BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK* , Vol.12 No.19, 6.
- Portal Kemlu. (2020). *Strategi Peningkatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Dengan Kolombia*. Retrieved from Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri: https://kemlu.go.id/files/repositori/56594/11_Strategi%20Peningkatan%20Diplomasi%20Ekonomi%20Indonesia%20dengan%20Kolombia.pdf
- Pratama, P. (2023). *Ongkos Sosial Jumbo yang Ditanggung Indonesia saat Masuk OECD*. Retrieved from <https://katadata.co.id/analisisdata/66bad8de310ae/ongkos-sosial-jumbo-yang-ditanggung-indonesia-saat-masuk-oecd>
- PT CGS. (2024, 05 28). *BERTEMU SEKJEN OECD, AIRLANGGA TEGASKAN KOMITMEN RI DALAM PROSES AKSESI*. Retrieved from <https://itrade.cgsi.co.id/bertemu-sekjen-oecd-airlangga-tegaskan-komitmen-ri-dalam-proses-aksesi>
- Puchala, D. J. (1982). *International Regimes: Lessons from Inductive Analysis*. International Organization.
- Rahardjo, M. (2016). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press). Yogyakarta, Indonesia.
- Rispan, et al. (2024). Paradigma Neoliberal dan Demokrasi Sosial dalam (Perspektif Ekonomi Islam) : Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ekonomi dan Akuntansi* , Volume. 1, Nomor. 2, 21.
- Rizki, M. (2020). Perspektif Neoliberalisme Dalam Privatisasi Sektor Kesehatan. *JURNAL TRANSBORDERS* , Vol. 3 No. 2 (45), 44-59.
- Rony et.al. (2024, 06 23). *Memperkuat Ruang Sipil (Civil Space) Dalam Akses Indonesia Menuju OECD*. Retrieved from <https://infid.org/wp-content/uploads/2024/08/Memperkuat-Ruang-Sipil-dalam-Akses-Indonesia-menuju-OECD-buku.pdf>
- Rosyidin, M. (2022). Realisme versus Liberalisme: Suatu PerbandinganParadigmatis. *Indonesian Perspective Journal* , 7, 14.
- Saepudin. (2024). Agenda The Global South dalam Upaya Reformasi World Trade Organization (WTO): Perspektif G20 dan BRICS. *Jurnal Hubungan Internasional* ,

26.

- Safura et al. (2021). *KOMITMEN INDONESIA DALAM LIBERALISASI JASA TELEKOMUNIKASI: GATS, AFAS, DAN ASEAN+*. Palembang Indonesia.
- Sapitri, K. D. (2024). *Bagaimana Dampak Kebijakan Global Mempengaruhi Sistem Perpajakan Indonesia*. Retrieved from Pajakku.: <https://artikel.pajakku.com/bagaimana-dampak-kebijakan-global-mempengaruhi-sistem-perpajakan-indonesia/>
- Saputra, B. (2024). *Airlangga sebut proses aksesi OECD turut melibatkan para pengusaha*. Retrieved 11 30, 2024, from <https://theprakarsa.org/prakarsa-terlibat-aktif-dalam-persiapan-aksesi-indonesia-menjadi-anggota-oecd/>
- SARP, O. (2024). *OECD Southeast Asia Regional Programme*. Retrieved 02 10, 2025, from <https://www.oecd.org/en/about/programmes/southeast-asia-regional-programme/>
- Sekretariat Kabinet. (2020). *Amerika Serikat Resmi Perpanjang Fasilitas GSP untuk Indonesia*. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Sekretariat Kabinet RI. (2024, 05 28). *Presiden Jokowi Bertemu Sekjen OECD Bahas Kelanjutan Keanggotaan Penuh Indonesia*. Retrieved 10 28, 2024, from <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-bertemu-sekjen-oecd-bahas-kelanjutan-keanggotaan-penuh-indonesia/>
- Sekretariat Kabinet RI. (2024). *Presiden Jokowi Pimpin Ratas Persiapan Keanggotaan Indonesia di OECD*. (S. K. Indonesia., Ed.) Retrieved 24 12, from <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-pimpin-ratas-persiapan-keanggotaan-indonesia-di-oecd/>
- Setiawan, D. (2021). *TRANSPLANTASI HUKUM PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM UU PENANAMAN MODAL INDONESIA*. *Dharmasiswa*: , 1, 19.
- Sheehy, B. (2022). *Does Law Matter in Asia? Comparing Corporate Governance Regimes in Indonesia and Malaysia*. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5162258
- Siregar, E. D. (2023). *Penerapan Prinsip Keterbukaan Bagi Emiten Dalam Pasar Modal*. *Jurnal Kertha Semaya* , Vol. 11 No. 8 , 10 .
- Siregar, N. (2024). *Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) Dalam Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan*. *Jurnal Kajian Hukum* , Vol.5 No.3, 9.
- Social Affairs Committee. (2015). *PARTICIPATION PLAN*. Retrieved from <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/participation-plans/PP-ELSAC-PUBLIC-ENG.pdf>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. Bandung, Indonesia : Penerbit Alfabeta Bandung.
- Suhartana, L. W. (2022). *Perubahan Bidang Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal*. *Jurnal Education and development* , Vol.10 No.2, 11.
- Sukmawati, M. (2023, 08 21). *Ini Dia Manfaat Jika Indonesia Menjadi Anggota OECD*. Retrieved 03 2025, 15, from Pajakku: <https://artikel.pajakku.com/ini-dia-manfaat-jika-indonesia-menjadi-anggota-oecd/>

- Surono et.al. (2022). PENGARUH PILLAR 1 OECD (UNIFIED APPROACH) TERHADAP PEMAJAKAN DIGITAL DI INDONESIA. *Jurnal Pajak Indonesia* , 10.
- Tim Nasional OECD. (2024). *TIM NASIONAL PERSIAPAN DAN PERCEPATAN KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN*. Retrieved from Portal Informasi Indonesia. Peraturan Presiden 2024: https://oecd.ekon.go.id/assets/dokumen/Keppres%20Nomor%2017%20Tahun%202024_Tim%20Nasional%20OECD.pdf
- TimNas OECD. (2024). *Proses Akses Indonesia menuju OECD*. Retrieved 12 21, 2024, from Tim Nasional OECD: <https://oecd.ekon.go.id/proses-aksesi>
- Tristi, M. (2021). Dampak Kebijakan Tarif dan Non-tarif Negara-Negara Importir atas Ekspor Tuna Olahan Indonesia. *urnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)* , Vol. 26 (3), 11.
- TUAC. (2025). *Indonesia's path to OECD membership requires urgent labour rights reforms first, say trade unions*. Retrieved 04 21, 2025, from <https://tuac.org/news/indonesias-path-to-oecd-membership-requires-urgent-labour-rights-reforms-first-say-trade-unions/>
- Tuti Nuriyati et al. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung.
- UKSW. (2023). Tinjauan Pustaka: Teori Neo-Liberal Institusional.
- Ulya Khasanah. (2023). Pengaruh FDI, Labour Productivity dan Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi European Union. *Jurnal Multidisiplin Ilmu* , 2, 248.
- Utama, A. (2024). *PRAKARSA Terlibat Aktif dalam Persiapan Akses Indonesia Menjadi Anggota OECD*. Retrieved 12 29, 2024, from <https://theprakarsa.org/prakarsa-terlibat-aktif-dalam-persiapan-aksesi-indonesia-menjadi-anggota-oecd/>
- Widiantara, I. P. (2023). *Indonesia Gabung Ke OECD? Akankah Menjadi Negara Maju*. Retrieved 04 5, 2025
- Wildan, M. (2024, 03 08). *Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul "OECD Bakal Tetapkan Roadmap Keanggotaan Indonesia pada Mei 2024*. Retrieved 10 28, 2024, from DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1801157/oecd-bakal-tetapkan-roadmap-keanggotaan-indonesia-pada-mei-2024>
- World Bank. (2020). *KAJIAN BELANJA PUBLIK INDONESIA: Belanja Untuk Hasil Yang Lebih Baik*. In K. Keuangan.
- WTO. (2022). *Policy tool #5 Import tariffs*. Retrieved from https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tptfca_05_05_import_tariffs_e.pdf
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research Third Edition: Design and Methods*. Sage Publications.
- Yose Rizal et.al. (2021). *MEMETIK KEUNTUNGAN DARI PERJANJIAN EKONOMITRANSFORMATIF: STUDI MENGENAI INDONESIA-EU CEPA*. Retrieved from https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/Memetik_Keuntungan__Indonesia_EU-CEPA.pdf?download=1
- Yoshida, Y. H. (2022). *KETERGANTUNGAN LAOS PADA TIONGKOK DALAM EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEBAGAI PENGHAMBATTERLAKSANANYA PROGRAM REDUCE INEQUALITY*.

Journal of International Relations , 6, 72-74.

Yusran. (2017). Mengkaji Neoliberal Institusionalisme Uni Eropa dalam Problematika. 03.

Zainal, R. (2019). *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia). Bandung.